



Teori Politik Keuangan Publik dan Kebijakan Anggaran

Pelaku Kebijakan Keuangan Negara

BAPPENAS

RPJM

PP

KEMENTERIANLEMBAGA

RENSTRA-KL

BAPPENAS+DEPKEU

PAGU INDIKATIF

SEB

KEMENTERIANLEMBAGA

RENJA-KL

BAPPENAS

RKP

PP

DEP.KEUANGAN

PAGU SEMENTARA

SE-MK

KEMENTERIANLEMBAGA

RKA-KL

DEP.KEUANGAN

HIMPUNAN RKA-KL

DEP.KEUANGAN

**NOTA KEU &
RAPBN**

PEMERINTAH+DPR

APBN

UU

DEP.KEUANGAN

RINCIAN APBN

Perpres

KEMENTERIANL+DEPKEU

DPA

PEMERINTAH+DPR

LKPP

UU

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

**PENGESAHAN
ANGGARAN**

PELAKSANAAN

PERTINGGJWB



Politik

- **Politik** adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.
- Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.
- Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
- Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
- Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
- Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.



Pengertian Politik Anggaran

- Politik anggaran adalah penetapan berbagai kebijakan tentang proses anggaran yang mencakup berbagai pertanyaan bagaimana pemerintah membiayai kegiatannya; bagaimana uang publik didapatkan, dikelola dan didistribusikan; siapa yang diuntungkan dan dirugikan; peluang-peluang apa saja yang tersedia baik untuk penyimpangan negati maupun untuk meningkatkan pelayanan publik.

(Noer Fauzi & R Yando Zakaria)



Pengertian Politik Anggaran (2)

- Politik anggaran adalah proses saling mempengaruhi di antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas pembangunan akibat terbatasnya sumber dana publik yang tersedia.
- Politik anggaran adalah proses mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggaran.
- Politik anggaran adalah proses penegasan kekuasaan atau kekuatan politik di antara berbagai pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan maupun alokasi anggaran.



Teori Politik Keuangan Negara

- Politik bisa terlibat dalam keseluruhan urusan kenegaraan, termasuk di dalamnya urusan finansial publik, baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi.
- Teori politik KN yang baik → **relatif** menurut ideologi.
- Teori politik KN yang baik bagi suatu negara belum tentu baik bagi negara lain.
- Aktivitas politik dalam keuangan negara tergantung pada derajat demokrasi, yang memberi keleluasaan/kebebasan aktivitas politik dalam suatu negara. (David N Hyman, 2010)



Teori Politik Keuangan Negara (2)

Dua golongan besar yang membedakan aktivitas politik dalam KN:

- Negara dengan sistem otokrasi, yakni suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang atau kelompok kecil (oligarki). Yakni negara yang berbentuk monarki, sosialis, theokrasi, dsb, dimana segala aktivitas negara dipegang sepenuhnya oleh penguasa negara.

Aktivitas politik sangat minim, meskipun ada biasanya berupa gerakan bawah tanah.



Teori Politik Keuangan Negara (3)

Dua golongan besar yang membedakan aktivitas politik dalam KN:

- Negara dengan sistem demokrasi, yakni suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan).

Aktivitas politik sangat besar, termasuk di dalamnya pengelolaan KN, sebagaimana negara penganut liberalisme, globalisme, kapitalisme, termasuk ideologi pancasila sebagai ciri khas Indonesia.



Keterlibatan Politik dalam KN

- Penentuan rencana program kerja pemerintah, baik mulai dari perencanaan sistem pembangunan nasional, RPJP, hingga Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- Penentuan prioritas APBN, baik belanja negara maupun penerimaan negara.
- Penentuan kebijakan anggaran, yang menentukan perlunya pos pembiayaan (defisit, surplus, berimbang).
- Penentuan besaran alokasi anggaran per pos belanja.



Kebijakan Anggaran

- suatu teknik untuk mengubah pengeluaran atau penerimaan Negara saat perekonomian guncang baik karena inflasi atau deflasi.
- suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah

Tujuan kebijakan anggaran adalah untuk menemukan arah, tujuan dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai propenas yang pada gilirannya meningkatkan kemakmuran masyarakat.



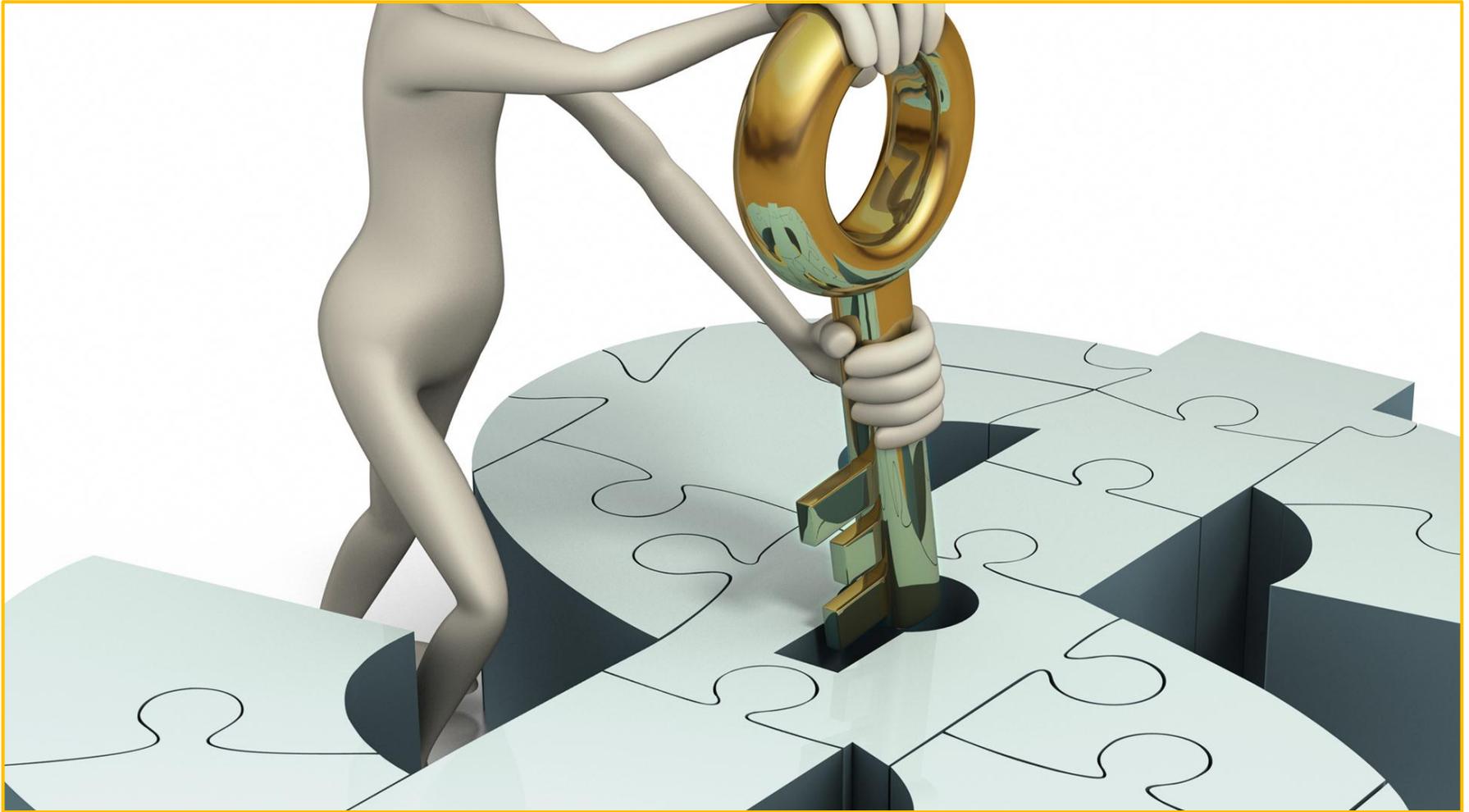
Macam Kebijakan Anggaran

1. Anggaran **Defisit** (Defisit Budget)/Kebijakan Fiskal Ekspansif, adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif.
2. Anggaran **Surplus** (Surplus Budget)/Kebijakan Fiskal Kontraktif, adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (*overheating*) untuk menurunkan tekanan permintaan.



Macam Kebijakan Anggaran

3. Anggaran **Berimbang** (Balanced Budget), terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
4. Anggaran **Dinamis**, Adalah suatu bentuk anggaran apabila penerimaan Negara dari tahun ke tahun selalu meningkat dan terbuka dan diiringi meningkatnya pengeluaran Negara, dari sisi penerimaan yang perlu ditingkatkan adalah penerimaan pajak, tabungan dan pinjaman pemerintah.



Semoga bermanfaat